

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir abad ke-20, kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh dunia. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang sulit atau bahkan tidak pernah hilang di dunia. Pada era *Sustainable Development Goals* (SDGs), dunia telah memasuki babak baru pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan konsep lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) dan berlaku selama 30 tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2030.¹

Sebagai bagian dari anggota PBB, Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Pada penyusunan SDGs, beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dalam MDGs tetap menjadi perhatian, salah satunya adalah kemiskinan. Dalam SDGs masalah kemiskinan terletak pada tujuan pertama SDGs. Tujuan pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah tanpa kemiskinan dalam segala bentuknya. Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari *Gross National Income* (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita.

¹ MUNAWAROH, L. R. A. 2023. *Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat Sdgs Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang masih banyak di alami oleh masyarakat Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Dalam konteks Indonesia, program pembangunan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah bersama masyarakat, sejak kemerdekaan hingga sekarang (era reformasi), sebenarnya juga telah memberikan perhatian yang besar bagi upaya penanggulangan kemiskinan.²

Kemiskinan dianggap sebagai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan dan bukanlah suatu kondisi yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Masalah kemiskinan sudah lama menjadi problema yang ada sejak dahulu. Di masa lampau, umumnya masyarakat mengalami kemiskinan bukan disebabkan oleh kekurangan pangan, melainkan karena keterbatasan dalam akses untuk mendapatkan materi.

Di Indonesia tekanan kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya pemenuhan fasilitas kehidupan modern, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) masih menjadi problema yang serius.³ Yang termasuk dari kebutuhan dasar seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan juga termasuk dalam masalah sosial yang sangat kompleks dan terdapat berbagai faktor yang menjadi

² Purwanto, A. B. 2016. Peran Lembaga Layanan Terpadu Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205-216.

³ Prawoto, N. 2008. Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.

aspek penyebab kemiskinan di suatu negara. Salah satunya adalah kurangnya pendapatan karena sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program pembangunan yang telah dijalankan sejauh ini selalu menunjukkan perhatian yang besar terhadap usaha mengurangi kemiskinan. Karena pada prinsipnya, tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius dan berkepanjangan.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, koordinasi dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) serta Departemen Sosial, kemiskinan yaitu ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan hidup layak (baik makan serta non makan). Garis kemiskinan ditetapkan BPS merupakan jumlah pengeluaran di butuhkan setiap individu memenuhi kebutuhan makan dan non makan.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2022 dan Maret 2023

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'22	Mar'23	Sep'22	Mar'23	Sep'22	Mar'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	10,35	9,79	17,06	16,92	14,75	14,45
2. Sumatera Utara	8,63	8,23	7,96	8,03	8,33	8,15
3. Sumatera Barat	4,90	4,67	7,20	7,23	6,04	5,95
4. Riau	6,49	6,73	7,07	6,65	6,84	6,68
5. Jambi	10,48	10,19	6,32	6,28	7,70	7,58
6. Sumatera Selatan	11,37	11,07	12,30	12,21	11,95	11,78
7. Bengkulu	14,53	14,21	14,24	13,96	14,34	14,04
8. Lampung	8,34	8,02	12,96	12,65	11,44	11,11
9. Kep. Bangka Belitung	3,48	3,54	6,13	5,85	4,61	4,52
10. Kepulauan Riau	5,46	5,05	10,63	10,69	6,03	5,69
11. DKI Jakarta	4,61	4,44	-	-	4,61	4,44
12. Jawa Barat	7,52	7,19	9,75	9,30	7,98	7,62
13. Jawa Tengah	10,02	9,78	12,05	11,87	10,98	10,77
14. DI Yogyakarta	10,64	10,27	14,00	13,36	11,49	11,04
15. Jawa Timur	7,78	7,50	13,90	13,98	10,49	10,35
16. Banten	5,89	6,00	7,29	6,79	6,24	6,17
17. Bali	4,12	3,77	5,58	5,50	4,53	4,25
18. Nusa Tenggara Barat	13,98	13,76	13,66	13,95	13,82	13,85
19. Nusa Tenggara Timur	9,00	9,12	24,11	23,76	20,23	19,96
20. Kalimantan Barat	4,63	4,44	8,10	8,07	6,81	6,71
21. Kalimantan Tengah	5,09	4,78	5,32	5,35	5,22	5,11
22. Kalimantan Selatan	4,03	3,84	5,17	4,72	4,61	4,29
23. Kalimantan Timur	4,97	4,68	9,71	9,28	6,44	6,11
24. Kalimantan Utara	5,58	5,18	9,15	8,74	6,86	6,45
25. Sulawesi Utara	5,04	4,91	10,16	10,38	7,34	7,38
26. Sulawesi Tengah	9,13	8,90	13,79	14,09	12,30	12,41
27. Sulawesi Selatan	4,98	5,01	11,81	11,91	8,66	8,70
28. Sulawesi Tenggara	7,22	7,40	13,60	13,94	11,27	11,43
29. Gorontalo	4,49	4,47	24,52	23,73	15,51	15,15
30. Sulawesi Barat	9,33	9,08	12,58	12,10	11,92	11,49
31. Maluku	5,90	5,49	24,54	24,64	16,23	16,42
32. Maluku Utara	6,17	6,23	6,45	6,55	6,37	6,46
33. Papua Barat	7,64	8,23	32,12	29,20	21,43	20,49
34. Papua	5,29	5,68	35,68	34,49	26,80	26,03
Indonesia	7,53	7,29	12,36	12,22	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara

jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dari wilayah Republik Indonesia yang telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang.⁴ Walaupun banyak program kemiskinan yang dilakukan pemerintah, tetapi masih adanya penduduk di Sumatera Barat yang hidup dalam kemiskinan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya terkait kemiskinan, melalui Misi ke-4 yakni “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya,” pada Prioritas

⁴ Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22-33.

ke-8, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran, serta penanganan daerah tertinggal.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.⁵ Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pembangunan akan berjalan dengan lancar apabila sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Hal ini menjadi sangat penting untuk meraih keberhasilan dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, yakni kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga konsep pembangunan daerah harus tetap berada di dalam bingkai pembangunan nasional. Maka dari itu, kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting.

Pelaksanaan pembangunan nasional, idealnya juga harus disertai koordinasi berbagai pihak terkait demi mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan

⁵ Ferezagia, D. V. 2018. Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.

efisien. Tercapainya tujuan pembangunan idealnya melibatkan banyak pihak baik dari instansi pusat, daerah, pihak swasta serta masyarakat sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2009:85) mengungkapkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Tabel 1. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota di Sumatera Barat

No.	Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)		Persentase Penduduk Miskin	
		2022	2023	2022	2023
1	Padang	42,37	41,97	4,26	4,17
2	Solok	2,28	2,35	3,02	3,05
3	Sawahlunto	1,47	1,47	2,28	2,27
4	Padang Panjang	2,89	2,98	5,14	5,26
5	Bukittinggi	6,16	5,78	4,46	4,11
6	Payakumbuh	8,08	7,88	5,66	5,44
7	Pariaman	3,80	3,91	4,13	4,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Berdasarkan pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan di kota Padang, tren penurunan tingkat kemiskinan Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan adanya penurunan sebesar 0,44% dari tahun 2018 (4,7%) ke tahun 2022 (4,26%). Terjadi peningkatan persentase kemiskinan di tahun 2021 ke angka 4,94% akibat Pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Namun berkat kerja keras dari seluruh dari seluruh pihak

melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah terkait serta bantuan dari lembaga non pemerintah lainnya, sehingga angka kemiskinan di tahun 2023 dapat diturunkan ke angka 4,17%.

Pemerintah kota Padang harus membangun komitmen yang kuat untuk mendorong terlaksana dan tercapainya agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di kota Padang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPJMD Kota Padang 2019-2024, rencana pembangunan daerah harus selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, dengan kata lain harus terwujud sinergi antara RPJMD Kota Padang dengan tujuan TPB.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Padang dapat dilihat sudah terjadi penurunan yang signifikan dibanding dengan kota lain karena dilihat dari jumlah penduduk yang sangat berbeda. Jumlah penduduk miskin di Kota Padang sangat banyak dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat. Penurunan kemiskinan di Kota Padang ini juga sangat signifikan dalam 12 tahun terakhir dikutip dari berita online sumbar satu.com, Walikota Padang Hendri Septa B.Bus. (Acc), MIB tanggal 08 April 2024 yaitu:⁶

“ Persentase kemiskinan tahun 2023 di Kota Padang 4,17 persen. Jumlah ini terendah dalam 12 tahun terakhir. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya (2022) 4,26 persen, dan 4,94 persen di tahun 2021. Capaian tahun 2023 tersebut melampaui target identitas kependudukan digital (IKD) pada Perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024, yaitu di angka 4,22 persen”

⁶ <https://sumbarsatu.com/berita/31601-apakah-anda-tahu-semasa-hendri-septa-wali-kota-padang-jumlah-penduduk-miskin-terendah-12-tahun-terakhir> diakses pada 16 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Kota Padang untuk di tahun 2023 sangat signifikan karena melebihi target dari RPJMD dari angka 4,22 % dan untuk di tahun 2023 angka kemiskinan Kota Padang menjadi 4,17%. Penurunan signifikan ini dilakukan Hendri Septa dengan menggulirkan program antara lain pelatihan untuk calon tenaga kerja melalui program kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan tidak dapat berjalan apabila tidak ada koordinasi yang baik. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang selalu melakukan koordinasi yang intensif dalam penanggulangan kemiskinan, serta melakukan evaluasi secara berkala. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia sebagai berikut:

“pencapaian ini diraih dengan berbagai langkah strategis, salah satu langkah kunci ialah program penanggulangan kemiskinan yang dikelola dengan ketat oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang” (wawancara dengan Maihendrizon, M.Mt selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tanggal 09 Juli 2024, Pukul 13.00 WIB)

Menurut Undang-Undang Dasar No 11 Tahun 2009 Pasal 19 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Pada Pasal 20 menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah

meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin agar mereka bisa melanjutkan hidup lebih mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah.⁷

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota didasari dari adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kota. TKPK Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Oleh sebab itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

“Sebenarnya ada 12 OPD yang melakukan koordinasi dalam TKPK, dan strategi penurunan kemiskinan di kota padang ada 3 yaitu, menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Itu dilaksanakan melalui TKPK, dari 3 strategi itu 12 OPD semuanya terlibat melalui program-program dari OPD tersebut. Dalam melakukan koordinasi, setiap OPD melakukan rapat rutin per triwulan apabila ditemukan masalah yang besar maka dilaksanakan Rapat Koordinasi (RAKOR) TKPK.” (wawancara bersama Defi Lora, ST. Msi selaku Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasannya sudah terlaksana alur informasi karena apabila terjadi masalah langsung cepat ditanggapi dan diatasi oleh beberapa OPD dan dilaksanakan juga rapat koordinasi. Sudah terdapat juga beberapa bentuk komunikasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Padang.

Berbagai upaya dan strategi dalam penurunan kemiskinan ini telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Salah satunya dengan membentuk TKPK yang didukung oleh beberapa perangkat daerah. Tim ini secara berkala berkoordinasi dan melaksanakan aksi nyata melalui program dan kegiatan penurunan angka kemiskinan di Kota Padang.

Pelaksanaan tugas TKPK Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui strategi dan program.⁸ Strategi dilakukan dengan :

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

⁸ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2020

- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dan juga untuk program terdiri atas :

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan

Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pronangkis sebagai berikut :

1. BAPPEDA (Koordinasi)
2. Dinas Sosial
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan Kota
5. Dinas Perikanan dan Pangan
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7. Dinas Pertanian
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

9. Dinas Nakerin
10. RSUD Dr. Rasidin
11. Bagian Kesra
12. Bagian Hukum

Aksi nyata penurunan kemiskinan di Kota Padang terus diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan diantaranya Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan sebagainya.

Namun dibalik keberhasilannya penurunan angka kemiskinan di Kota Padang melalui berbagai program yang sudah dilakukan dan usaha keras dari TKPK masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam penurunan angka kemiskinan. Secara khusus terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi program penanggulangan kemiskinan yakni⁹ :

- a. Masih ada SKPD yang menggunakan data berbeda dan ada yang belum menggunakan database kemiskinan yang dikeluarkan BPS, sehingga masih ditemui kelompok sasaran bukan dari masyarakat miskin.
- b. Banyaknya aktor dan pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan sehingga sulit berkoordinasi. Sehingga pelaksanaan program tumpang tindih dan belum tercapainya efektivitas anggaran.

⁹ Laporan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Triwulan IV Tahun 2023

- c. Evaluasi efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang melalui perubahan regulasi.
- d. Belum terintegrasinya lembaga-lembaga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan
- e. Kurang terintegrasinya sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Tantangan kemiskinan yang dihadapi Kota Padang masih besar. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, untuk merespon masalah kemiskinan dibutuhkan perencanaan, penganggaran dan pengembangan program secara tepat. Di samping itu, diperlukan juga dukungan sistem koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan yang efektif. Banyaknya aktor dan pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan sehingga sulit dalam berkoordinasi. Sehingga pelaksanaan program dapat terjadi tumpang tindih dan belum tercapainya efektivitas anggaran.

Pemerintah Kota Padang mempunyai aturan hukum tersendiri untuk mengatasi kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan.¹⁰ Perda tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara terarah dan tepat

¹⁰ Simamora, Y. E., & Khaidir, A. 2019. Implementasi Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 28-43.

sasaran. TKPK mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 sebagai unit pengaduan kegiatan pemberdayaan masyarakat program penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Untuk susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
- b. wakil kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
- c. anggota :
 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
dan

2. unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Tim ini merupakan lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang diharapkan mampu mendorong kerjasama dan sinergitas antar instansi pemerintah sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 132 Tahun 2023, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana aksi Pemerintah Daerah;
- b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tim koordinasi atau yang lebih dikenal sebagai TKPK wilayah kota memiliki tugas dalam upaya penanggulangan kemiskinan sesuai pada pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kota; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota.

Adapun yang termasuk dari bagian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No	Jabatan Kedinasan / Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Wali Kota Padang	Penanggung Jawab
2	Wakil Wali Kota Padang	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Wakil Sekretaris
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Sekretaris
A. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Koordinator
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
4	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Anggota
6	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
8	Bundo Kandang Kota Padang	Anggota

9	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang	Anggota
10	Forum Kota Sehat Kota Padang	Anggota
11	Badan Pusat Statistik Kota Padang	Anggota
12	Kepala Badan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
14	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
B. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang	Koordinator
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Anggota
4	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Anggota
5	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang	Anggota
7	Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang	Anggota
8	Unsur PT. Semen Padang	Anggota
9	Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang	Anggota
10	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Padang	Anggota
11	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Padang	Anggota
12	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Padang	Anggota
13	Kepala Bidang Penta Lintas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
14	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota
C. Sekretariat		
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Kepala
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Kepala

3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
4	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
5	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
6	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
7	Analisis Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Analisis Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
10	Pengadministrasian Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota

Sumber : Olahan Peneliti

Pada tabel diatas dapat kita lihat mengenai susunan keanggotaan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Terdapat 12 perangkat daerah maupun non pemerintahan dan LSM yang termasuk pada susunan keanggotaan TKPK Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang sebagai salah satu anggota yang tergabung pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang merupakan *leading sector* dan instansi yang sering terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.

Secara keseluruhan bagi masyarakat miskin yang ingin memperoleh bantuan sosial dari program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Padang yang bisa dilakukan pengusulan melalui kelurahan masing-masing. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman maupun Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam upaya mengatasi permasalahan sosial tersebut. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, pemerintah Kota Padang melakukan berbagai upaya dalam membantu permasalahan sosial masyarakat yang ada di Kota Padang. Dengan melalui kegiatan perbaikan Rumah Tak Layak Huni bagi fakir miskin dan Pelatihan bagi pencari kerja. Program yang diberikan kedua instansi ini ditujukan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan memang sangat dibutuhkan koordinasi antar instansi agar dapat tercapai tujuan dari TKPK. Maka dari itu peneliti memilih fokus penelitian pada beberapa instansi yang terkait untuk menjadi fokus penelitian karena saling melakukan koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi TKPK Kota Padang untuk mengurangi angka kemiskinan.

Pembangunan yang efektif, efisien, dan merata membutuhkan perencanaan yang matang dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin

menambah deret kemiskinan di negeri ini. Dengan memperkuat koordinasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Padang maka akan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggara koordinasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di daerah dimaksudkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya, antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi vertikal dan antara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tercapainya tertib pemerintah dan pembangunan di daerah. Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen diartikan sebagai suatu usaha menserasikan langkah dan kegiatan antara berbagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menyerasikan dan memadukan berbagai kegiatan terutama kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka dilaksanakan melalui koordinasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Padang Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang saya teliti adalah Bagaimana Koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Padang untuk mengurangi angka kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Padang untuk mengurangi angka kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam yaitu tentang koordinasi TKPK dalam mengurangi angka kemiskinan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dapat menjadi wawasan atau pengetahuan kepada pembaca terkhusus mahasiswa Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya apabila ada penelitian yang bersangkutan mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa kajian yang dapat digunakan khususnya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Padang untuk mengurangi angka kemiskinan.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan semangat peneliti dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

